

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

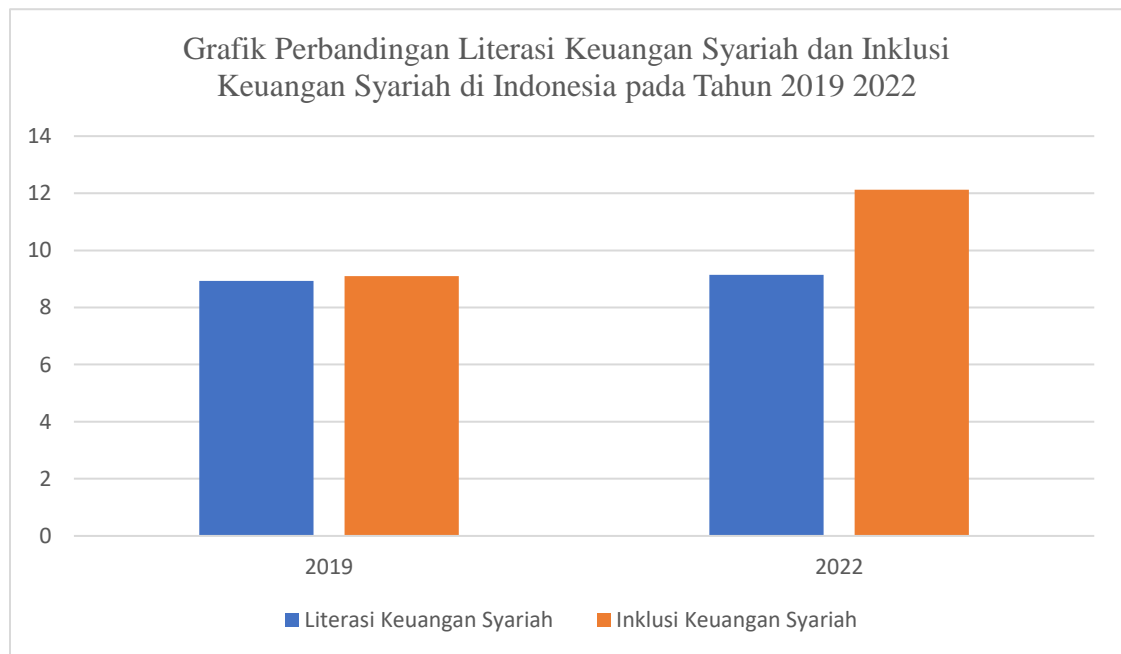
Pada masa pandemi covid 19 tepatnya pada tahun 2021 berdasarkan laporan perekonomian Provinsi Banten, tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan IV mencapai angka 3,69%. Sedangkan pada tahun ini masa pasca pandemi covid 19 pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I 2022 terus meningkat hingga angka 4,7% hingga 5,5% (yoy) dan diperkirakan akan terus berlanjut, hal ini didorong oleh mobilitas masyarakat yang semakin meningkat pasca meratanya vaksinasi di wilayah Banten.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan Provinsi Banten. Presentase tingkat kemiskinan Provinsi Banten terdapat pada angka 6,66% dengan kepadatan penduduk 1.248 juta jiwa pada tahun 2021, angka tingkat kemiskinan ini berada diatas Provinsi DKI Jakarta yang menyentuh angka 4,72% dengan kepadatan penduduk 15.978 juta jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa angka kemiskinan Provinsi Banten lebih tinggi dibandingkan Provinsi DKI Jakarta, yang berarti masyarakat Provinsi Banten masih belum merata dalam kesejahteraan masyarakatnya.

Berdasarkan hasil Survey Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019

di daerah Banten yang diperoleh dari web Otoritas Jasa Keuangannya langsung menunjukkan bahwa Banten memiliki indeks inklusi keuangan sebesar 84,29% dengan indeks literasi keuangan sebesar 39,27%. Artinya, banyak masyarakat Provinsi Banten yang sudah dapat mengakses beberapa produk atau jasa dari sebuah Lembaga keuangan formal. Tetapi tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakatnya masih rendah dalam mengatur keuangannya sendiri, oleh karena itu diperlukan peningkatan yang harus dilakukan untuk memahami, mengatur, dan memutuskan perputaran keuangan dengan baik guna mensejahterakan individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Literasi Keuangan Syariah dan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia



Adapun hasil Survey Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Syariah di Indonesia pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari hasil survey tahun 2019. Indeks literasi keuangan syariah pada tahun 2022 berada pada angka 9,14% meningkat sebanyak 0,21%. Sementara itu, tingkat inklusi keuangan syariah di Indonesia berada pada angka 12,12% meningkat sebanyak 3,02%. Artinya masyarakat di Indonesia masih minim sekali tentang adanya literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah. Hal ini berbanding jauh jika dikaitkan dengan hasil Survey Nasional Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang dilakukan di Provinsi Banten. Berarti pada masyarakat banten harus sudah ditingkatkan dalam pemahaman tentang literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah.

Dilansir dari ekonomi.republika.co.id, anggota dewan komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Frederica Widyasari mengatakan bahwa pihaknya sedang merencanakan program dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di seluruh wilayah Indonesia. Hanya saja angkanya masih kecil, tetapi beliau menyatakan bahwa terdapat beberapa daerah yang memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan syariah dimana salah satunya terdapat Provinsi Banten. Artinya, Provinsi Banten sudah memiliki indeks literasi dan inklusi keuangan syariah meskipun masih sangatlah kecil, dan itu menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terkait pengelolaan keuangan yang sesuai dengan syariat islam masih sangatlah sedikit/kecil dan harus dengan segera ditingkatkan demi kemaslahatan masyarakat.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menanggulangi angka kemiskinan yang makin tinggi, pemerintah membuat Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang bertujuan untuk memberikan ketersediaan akses bagi para masyarakat Indonesia terhadap produk layanan keuangan formal. Inklusi keuangan dalam Perpres No 114 tahun 2020 merupakan komponen penting dalam meningkatkan kesenjangan ekonomi antarindividu maupun antardaerah, memberantas kemiskinan, dan menciptakan stabilitas sistem keuangan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan inklusi keuangan adalah adanya ilmu tentang literasi keuangan.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kautsar, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan tingkat inklusi keuangan adalah literasi keuangan, modal social, usia, pendapatan dan Pendidikan. Tetapi dalam penelitian ini hanya memfokuskan ke beberapa variable saja yaitu literasi keuangan, pendapatan, dan juga modal social. Berdasarkan definisinya, modal social adalah suatu keterikatan hubungan antar individu manusia secara berkelompok yang terbentuk melalui norma dan kualitas hubungan yang terjadi di dalam kelompok tersebut. (Sari & Kautsar, 2020)

Dengan arti lain, modal social dapat diartikan sebagai norma dan jaringan yang melancarkan interaksi dan transaksi social sehingga segala urusan bersama masyarakat dapat diselenggarakan dengan mudah (Widodo, 2016). Selain itu menurut Syafitri dan Sudarwati (2015) menjelaskan bahwa modal social adalah serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki

Bersama antara para anggota kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya Kerjasama. Di dalam modal social terdapat beberapa unsur pokok penting diantaranya adalah kepercayaan seperti kejujuran dalam pemenuhan kewajiban yang harus dilakukan, Kerjasama antar para anggota dalam suatu kelompok, solidaritas, dan rasa keadilan yang berlaku dan merata pada setiap anggotanya. Kepercayaan dan kejujuran adalah unsur penting dalam pembentukan modal social (*Social Caopital*), yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas kelompok tersebut secara menyeluruh. Hilangnya kepercayaan akan menimbulkan beberapa konflik yang terjadi dan akan menguras banyak energi dan waktu yang terbuang secara cuma-cuma. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju dan canggih dalam modal social muncullah berupa fitur dan layanan keuangan yang akan memberikan kemudahan inklusi keuangan yang dapat digunakan oleh masyarakat di kelompok tersebut. (wildan, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Pulungan dan Ndururu, bahwa modal social memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan (Pulungan & Ndruru, 2019). Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Michelle (2016) memiliki hasil yang berbanding terbalik, dimana modal social secara negative dan tidak berpengaruh signifikan terhadap inklusi keuangan . Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novita (2020), dimana hasil menunjukkan bahwa modal social tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap inklusi keuangan.

Menurut data laporan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, Upah Minimum Provinsi (UMP) Banten menyentuh di urutan ke-24 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia dengan rata-rata 2,5 Juta rupiah. Dalam data laporan tersebut dalam lingkup pulau jawa, Provinsi Banten masih berada diatas Provinsi Jawa tengah, Yogyakarta, tetapi masih jauh dibawah Provinsi Jakarta. Artinya, rata-rata Upah Minimum Provinsi masih terbelang di tingkah menengah, hal ini harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik guna menjadikan masyarakat yang lebih sejahtera.

Dengan beberapa penjelasan yang sudah dijabarkan diatas, penulis mengambil studi kasus masyarakat Provinsi Banten dikarenakan tingkat literasi keuangan syariah dan inklusi keuangan syariah disana masih sangat kecil, hanya berada pada angka 9,14% (literasi keuangan syariah) pada tahun 2022, dan 12,12% (inklusi keuangan syariah) pada tahun 2022. Selain itu tingkat pendapatan di Provinsi Banten masih berada pada urutan ke 24 dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, apakah hal itu menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah di Provinsi Banten.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adinda Novita Sari dan Achmad Kautsar tentang “Pengaruh Literasi Keuangan, *Financial Tehcnology*, dan Demografi terhadap Inklusi Keuangan pada Masyarakat di Kota Surabaya” memberikan hasil bahwa literasi keuangan adalah faktor yang paling berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Selain itu juga ada usia dan tingkat Pendidikan yang berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan.

Sedangkan jenis kelamin dan pendapatan tidak berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan. Artinya semakin baik pengetahuan/pemahaman seseorang, usia, dan tingkat Pendidikan seseorang pada masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan dalam mengatur perekonomiannya sendiri pada masyarakat.

Maka dari itu, penulis ingin menjadikan hal tersebut untuk dijadikan sebuah judul penelitian dalam karya tulis ini. Penulis berharap dengan adanya karya tulis tentang literasi keuangan syariah, tingkat pendapatan, dan modal sosial ini dapat meningkatkan inklusi keuangan Provinsi Banten agar tingkat pertumbuhan ekonomi semakin membaik, dan masyarakat semakin sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang dipaparkan peneliti merumuskan beberapa topik permasalahan yang bisa diangkat menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan syariah?
2. Apakah modal sosial berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan syariah?
3. Apakah tingkat pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap inklusi keuangan syariah?

C. Tujuan Penelitian

Isi tujuan penelitian ini peneliti ingin menyelaraskan dengan rumusan masalah yang diangkat dari penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan syariah terhadap inklusi keuangan syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh modal sosial terhadap inklusi keuangan syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan terhadap inklusi keuangan syariah

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat luas betapa pentingnya literasi keuangan syariah, tingkat pendapatan, dan modal sosial terhadap peningkatan inklusi keuangan syariah. Dengan meningkatnya inklusi keuangan syariah, peneliti berharap dengan sungguh perekonomian di Negara Indonesia semakin membaik, karena masyarakatnya sudah mendapatkan edukasi tentang mengelola keuangan pribadi dengan baik dan sesuai dengan syariat islam.